

TESIS
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAERAH
SUB SEKTOR PETERNAKAN DALAM MENGOPTIMALKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

Disusun Oleh :

NAMA : JAMALUDDIN ZA
NPM : 2042021026
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik
(M.Tr. AP)



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

2022

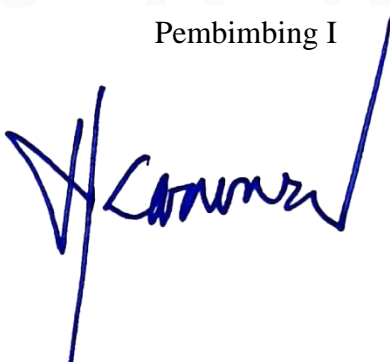
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Jamaluddin ZA
NPM : 2042021026
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Potensi Penerimaan Daerah Sub Sektor Peternakan dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Analysis of Regional Revenue Potential in the Livestock Sub-sector in Optimizing the Original Regional Income in Lebak District*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. R. Luki Karunia, SE Ak., MA

Pembimbing II



Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

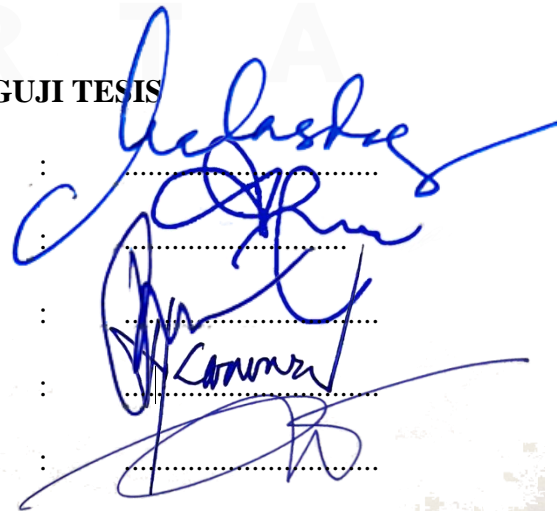
NAMA : JAMALUDDIN ZA
NPM : 2042021026
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAERAH
SUB SEKTOR PETERNAKAN DALAM
MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LEBAK

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 04 Maret 2022
Pukul : 08.00

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA :
Sekretaris : Dr. A. Rina Herawati, M.Si :
Anggota : Ratri Istania, MA., Ph.D :
Pembimbing 1 : Dr. R. Luki Karunia, MA :
Pembimbing 2 : Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D :



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamaluddin ZA
NPM : 2042021026
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Tesis yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan penulisan Tugas Akhir/Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 04 Maret 2022

Penulis



Jamaluddin ZA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang kita harapkan safaatnya dikemudian hari.

Pembuatan Tesis ini banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. R. Luki Karunia, SE.AK., MA selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing dalam penyusunan tesis selama ini.
2. Ibu Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing dalam penyusunan tesis selama ini.
3. Ibu Dr. Rina Herawati, M.Si sebagai dosen pembahas yang banyak memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini
4. Ibu Dr. Ratri Istania, MA sebagai pembahas yang banyak memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini
5. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA sebagai penguji pada Sidang Tesis yang banyak memberikan masukan pada perbaikan tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin sebagai Direktur Politeknik STIA LAN
Jakarta
7. Bapak Dr Asropi, M.Si selaku Ketua Prodi APN Magister Terapan
8. Istri dan Anak-anak tercinta yang selalu memberi dukungan moril dan sprituil selama ini

9. Teman teman Magister Terapan angkatan 2020 yang selalu bersama sama berjuang menuntut ilmu di Politeknik STIA LAN Jakarta selama ini

10. Seluruh Dosen Magister APN dan seluruh Civitas Akademika Politeknik STIA LAN Jakarta

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, namun walaupun demikian semoga dapat bermanfaat.

Jakarta, 04 Maret 2022

Penulis

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAERAH SUB SEKTOR PETERNAKAN DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

Jamaluddin ZA, R. Luki Karunia, Arifiani Widjayanti
Politeknik STIA LAN Jakarta
2042021026@stialan.ac.id

Penelitian ini tentang potensi penerimaan daerah sub sektor peternakan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kondisi pembangunan daerah Kabupaten Lebak ? dan Bagaimana retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari data kondisi pembangunan daerah Kabupaten Lebak, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak dan data potensi penerimaan daerah dari sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak. Data diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan Badan Pusat Statistik. Pengolahan data dan analisis data menggunakan Miles dan Huberman (1992) yaitu melakukan koleksi data selanjutnya melakukan reduksi data lalu melakukan penyajian data kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub sektor peternakan mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebak.

Kata kunci- Potensi; Sub Sektor Peternakan; Optimal; Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL REVENUE POTENTIAL IN THE LIVESTOCK SUB-SECTOR IN OPTIMIZING THE ORIGINAL REGIONAL INCOME IN LEBAK DISTRICT

Jamaluddin ZA, R. Luki Karunia, Arifiani Widjayanti
NIPA School of Administration Jakarta
2042021026@stialan.ac.id

This research is about the regional revenue potential in the livestock sub-sector in optimizing the original regional income in lebak district. The formulation of the problem in this research is how is the condition of regional development in Lebak District ? and How are the levies for the livestock sub-sector in Lebak District?. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection is done by triangulation, namely interviews, observations, and document studies. This study uses secondary data taken from data on regional development conditions in Lebak District, a realization of revenue from Lebak District's Original Revenue, and data on potential regional revenues from the livestock sub-sector in Lebak District. Data were obtained from the Livestock Service Office of Lebak District, the Lebak District Regional Revenue Agency, and the Central Statistics Agency. Data processing and data analysis using Miles and Huberman (1992) are to collect data then perform data reduction and then perform data presentation and then draw conclusions. The results of the study indicate that the livestock sub-sector has enormous potential in increasing the Original Regional Income in Lebak District.

Keywords- Potential; Livestock Sub-Sector; Optimal; Original Regional Income

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.1.1. Penelitian Terdahulu PAD Sub Sektor Peternakan.....	10
2.1.2. Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Potensi PAD.....	16
2.2. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	24
2.2.1. Tinjauan Kebijakan.....	24
2.2.1.1. Tinjauan Kebijakan Mengenai Pendapatan Asli Daerah(PAD).....	24
2.2.1.2. Tinjauan Kebijakan PAD Sub Sektor Peternakan.....	28
2.2.2. Tinjauan Teoritis.....	29
2.2.2.1. Potensi Daerah.....	29
2.2.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	33
2.2.2.3. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah.....	37
2.3. Krangka Berfikir.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
3.1. Metode Penelitian.....	45
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	45

3.3	Prosedur Pengolahan Data.....	49
3.4	Instrumen Penelitian.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1	Wilayah Administratif.....	53
4.1.2	Topografi.....	55
4.1.3	Kondisi Demografi.....	57
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
4.2.1	Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.....	60
4.2.1.1	Infrastruktur Daerah Kabupaten Lebak.....	62
4.2.1.2	Kondisi Investasi di Kabupaten Lebak	65
4.2.1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak.....	71
4.2.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak.....	75
4.2.2.1	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PAD Kabupaten Lebak	83
4.2.3	Kebijakan Daerah Lain Tentang Retribusi Sub Sektor Peternakan.....	87
4.2.4	Potensi PAD Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Lebak.....	95
4.2.4.1	Potensi PAD Sub Sektor Peternakan dari Retribusi Jasa Umum.....	95
4.2.4.2	Potensi PAD Sub Sektor Peternakan dari Retribusi Jasa Usaha.....	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		119
4.1	Kesimpulan.....	119
4.2	Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....		124

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Informan Kunci.....	47
4.1. Perbandingan Populasi Ternak di Kabupaten dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Banten Tahun 2019.....	52
4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2020.....	57
4.3. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak.....	58
4.4. UMK di Provinsi Banten.....	69
4.5. Struktur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2018....	76
4.6. Struktur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2019.....	79
4.7. Struktur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2020..	80
4.8. Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Bandung Barat Tahun 2017.....	89
4.9. Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Jombang Tahun 2020	90
4.10. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Barat...	90
4.11. Tarif Retribusi Sub Sektor Peternakan Provinsi Jawa Tengah.....	91
4.12. Tarif Retribusi Kesehatan Hewan Propinsi Banten.....	92
4.13. Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah di Puskesmas.....	93
4.14. Pengeluaran Ternak dan Telur Sesuai SKKH Tahun 2020.....	99
4.15. Potensi PAD Sub Sektor Peternakan Berdasarkan SKKH.....	100
4.16. Data Pengeluaran Ternak dari Kabupaten Lebak Sesuai SKKH Bulan Januari- Agustus Tahun 2021.....	101
4.17. Potensi PAD Kabupaten Lebak Berdasarkan SKKH Bulan Januari Sampai Agustus 2021.....	102
4.18. Data Potensi Pengeluaran Ternak dari Kabupaten Lebak.....	103
4.19. Potensi PAD dari SKKH.....	104
4.20. Populasi <i>Breeding Farm</i> di Kabupaten Lebak.....	107
4.21. Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Jenis Hewan.....	111
4.22. Jumlah Pelayanan Hewan Kesayangan Tahun 2016-2020.....	113
4.23. Jumlah Populasi Ternak UPTD PTR HPT Dinas Peternakan	

Kabupaten Lebak.....	116
4.24. Pertambahan Populasi Ternak UPTD PTR HPT dari Kelahiran Pedet Tahun 2016-2020.....	117



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Lebak.....	54
Gambar 4.2. Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak.....	56
Gambar 4.3. Persentase Jumlah Perizinan di Kabupaten Lebak Tahun 2020.	67
Gambar 4.4. Realisasi Investasi LKPM di Kabupaten Lebak Tahun 2020.....	70
Gambar 4.5. Grafik Realisasi Investasi di Kabupaten Lebak.....	71
Gambar 4.6. Penyumbang lima Besar PDRB di Kabupaten Lebak.....	74
Gambar 4.7. Grafik Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak.....	81
Gambar 4.8. Grafik PAD Dinas Peternakan Kabupaten Lebak Tahun 2013-2020.....	82
Gambar 4.9. Grafik Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PAD Kabupaten Lebak.....	84
Gambar 4.10. Perbandingan Kontribusi PAD Sub Sektor Peternakan dengan Sub Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Lebak.....	85
Gambar 4.11. Grafik Perbandingan Kontribusi Sub Sektor Peternakan dengan Perikanan di Kabupaten Lebak.....	86
Gambar 4.12. Pertumbuhan Perusahaan Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2016-2020.....	96
Gambar 4.13. Grafik Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2020.....	112
Gambar 4.14. Pelayanan Hewan Kesayangan Tahun 2016-2020.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data PAD Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2013 sampai dengan 2020.....	129
Lampiran 2. Panduan Wawancara.....	130
Lampiran 3. Usulan Peraturan Daerah Retribusi Sub Sektor Peternakan Kabupaten Lebak.....	139
Lampiran 4. Surat Pengantar Penelitian.....	170
Lampiran 5. Surat Sudah Melaksanakan Penelitian.....	171
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	172

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPS	=	Badan Pusat Statistik
DDF	=	Derajat Desentralisasi Fiskal
DOC	=	<i>Day Old Chicken</i>
DPRD	=	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HE	=	<i>Hatching Egg</i>
IB	=	Inseminasi Buatan
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
KBBI	=	Kamus Besar Bahasa Indonesia
LQ	=	<i>Location Quotient</i>
ND	=	<i>Newcastle Disease</i>
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
PMA	=	Perusahaan Modal Asing
PMDN	=	Perusahaan Modal Dalam Negeri
PTR-HPT	=	Perbibitan Ternak Ruminansia-Hijauan Pakan Ternak
RPH	=	Rumah Potong Hewan
RPJMD	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPU	=	Rumah Potong Unggas
RTRW	=	Rencana Tata Ruang Wilayah
SE	=	<i>Septicemia Epizootica</i>
SKKH	=	Surat Keterangan Kesehatan Hewan
SKKPH	=	Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan
SOP	=	Standar Operasional Prosedur
UMK	=	Upah Minimum Kabupaten/Kota
UPTD	=	Unit Pelayanan Teknis Dinas

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda, tergantung seberapa cepat suatu daerah memanfaatkan potensi yang ada untuk memajukan daerahnya. Daerah yang memiliki kemampuan menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan akan lebih cepat dalam membangun daerah dibanding daerah yang tidak bisa menggali potensi. Daerah yang ingin maju lebih cepat harus bisa melihat keunggulan daerahnya mulai dari keunggulan komparatif kemudian ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif. Daerah yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif akan lebih cepat meningkatkan pembangunan daerah. Salah satu indikator pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS Provinsi Banten (2019) bahwa :

“Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak pada tahun 2019 berada pada posisi terendah di Provinsi Banten yaitu 63,88. Akan tetapi IPM Kabupaten Lebak terjadi peningkatan sebesar 0,80 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Terdapat tiga dimensi pembangunan manusia yaitu tingkat kesehatan, standar hidup yang layak, tingkat pengetahuan dan keterampilan. Dimensi standar hidup layak berkaitan sekali dengan seberapa besar kemampuan daerah meningkatkan pendapatannya, semakin tinggi pendapatan daerah akan semakin mudah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Meningkatkan standar hidup perlu upaya yang lebih keras yang dilakukan oleh Kabupaten Lebak agar setara dengan daerah lain yang lebih maju. Mengejar ketertinggalan diperlukan upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu potensi sumber pendapatan daerah Kabupaten Lebak adalah retribusi sub sektor peternakan.

Saat ini daerah Kabuptaen/Kota sudah menjadi daerah otonom, sehingga daerah harus bisa memanfaatkannya untuk kemajuan daerahnya. Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di berbagai bidang selain kewenangan pada bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan agama. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Menurut Santoso (2020) bahwa otonomi adalah merupakan dorongan bagi pemerintah daerah supaya bisa meningkatkan potensi dari sumber-sumber pendapatan di daerah. Kemudian menurut Ardiansyah, et al (2014) bahwa otonomi daerah mengharuskan setiap daerah supaya bisa membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.

Pemerintah daerah (istilah yang digunakan secara bergantian dengan otoritas lokal, dewan dan kotamadya) kadang-kadang hanya disebut dalam literatur ekonomi sebagai otoritas sub-pusat (Bailey, 1999). Pemberian otonomi daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Keberadaan otonomi daerah saat ini memberikan ruang dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pemasukan daerah untuk mendukung pembangunan di daerahnya,

diantaranya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Menurut Muryawan & Sukarsa (2016) bahwa desentralisasi fiskal dapat diartikan dengan pemberian kewenangan bagi daerah agar dapat menggali sumber-sumber penerimaan, memiliki hak mendapatkan transfer dari pemerintahan yang berada di atasnya serta menentukan keadaan belanja rutin serta investasi.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk pembangunan suatu daerah. Sebab daerah tidak dapat hanya mengandalkan APBD yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan daerahnya. Oleh karena itu perlu sumber-sumber penerimaan lain untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan daerah dapat diperoleh dari sumber pendapatan yang memungkinkan seperti retribusi dan pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tingkat kemandirian suatu daerah tergantung jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergantung seberapa cerdas daerah melihat potensi dan memanfaatkannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari retribusi. Potensi retribusi terus dikaji agar dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sarimole (2018) bahwa Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur daerahnya dan diberikan wewenang untuk bisa mengeksplorasi potensi sumber daya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal telah mendapat dukungan oleh sebagian besar organisasi pembangunan terkemuka dunia termasuk Bank Dunia, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan Bank Pembangunan Asia antara lain dalam dua sampai tiga dekade terakhir. Oleh karena itu sangat penting bahwa beberapa bentuk pemikiran diberikan untuk pengoperasian sistem ini agar lebih bermanfaat (Ankamah, 2012). Pemerintah harus menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan digunakan secara efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Egbunike et al., 2018)

Menurut Halim et al (2020) berlandaskan undang-undang serta peraturan pelaksanaan, terdiri dari beberapa pungutan lain yang diperoleh oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Perolehan tersebut antara lain yaitu retribusi, retribusi tersebut merupakan pembayaran masyarakat kepada negara akibat dari penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh negara. Pembayar retribusi mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari pemerintah. Retribusi lebih banyak diberlakukan di pemerintah daerah.

Pungutan retribusi dapat dilakukan dari sumber-sumber yang sah termasuk didalamnya retribusi yang bersumber dari sub sektor peternakan. Pungutan retribusi sub sektor peternakan sudah dilakukan di Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Peraturan Daerah tersebut telah dicantumkan tarif atau biaya yang dapat dipungut untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat dari sub sektor peternakan. Kabupaten tetangga dari Kabupaten Bandung Barat yaitu Kabupaten Bandung juga mengeluarkan peraturan daerah tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah bidang peternakan yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang retribusi sub sektor peternakan jauh lebih lama, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang retribusi pelayanan kesehatan hewan yang menjelaskan tarif retribusi dari jenis pelayanan yang dilakukan.

Sampai saat ini hal tersebut diatas belum dilakukan di Kabupaten Lebak, padahal Kabupaten Lebak memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sub sektor peternakan yang tidak kalah jika dibandingkan dengan daerah lain. Jika dibandingkan Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak jauh lebih luas dan memiliki daya dukung usaha peternakan yang lebih banyak. Kabupaten Bandung Barat memiliki luas 1.305,77 km² (Profil Daerah Bandung Barat), sedangkan Kabupaten Lebak memiliki luas 3,305,07 km² (RPJMD Kabupaten Lebak 2019-2024). Kemudian Kabupaten Lebak memiliki daya dukung pakan ternak yang lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat yaitu produk dan limbah pertanian. Kabupaten Lebak memiliki lahan sawah seluas 103.549 Ha (BPS Kabupaten Lebak, 2021), sedangkan Kabupaten Bandung Barat memiliki lahan pertanian seluas 66.500 Ha (Kabupaten Bandung Barat, 2021). Begitu juga halnya dengan jumlah populasi ternak sebagian populasi ternak di Kabupaten Lebak lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat, diantaranya populasi kerbau di Kabupaten Lebak tahun 2020 sebanyak 18.742 ekor, populasi kambing 100.643 ekor dan populasi ayam pedaging 39.006.265 ekor (Dinas Peternakan Kabupaten Lebak), sedangkan populasi ternak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 yaitu populasi kerbau 1.491 ekor, kambing 35.616 ekor dan ayam pedaging 13.324.581 ekor (BPS Jawa

Barat, 2021). Sedangkan luas Kabupaten Sumbawa Barat jauh lebih sempit dibandingkan dengan Kabupaten Lebak, luas Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 1,849.02 km². Kemudian jumlah populasi ternak kerbau sebanyak 15.375 ekor, populasi ternak kambing 17.207 ekor dan populasi ayam petelur 15.740 ekor (BPS Kabupaten Sumbawa Barat, 2021). Data-data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi sub sektor peternakan yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Penggalian potensi-potensi sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak penting dilakukan agar tidak mengakibatkan kerugian bagi Kabupaten Lebak akibat tidak memanfaatkan potensi yang ada untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berakibat terhadap rendahnya pembangunan di daerah atau sebaliknya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono (2015) bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori daerah yang masih tertinggal. Namun demikian sumber daya Kabupaten Lebak sangat melimpah. Kabupaten Lebak merupakan hamparan yang luas, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan hutan. Hal ini yang menjadikan Kabupaten Lebak sangat potensial untuk pengembangan usaha yang berbasis pertanian termasuk didalamnya peternakan. Luas wilayah Kabupaten Lebak yaitu 304.472 Ha (Profil Kabupaten Lebak, 2021). Lahan di Kabupaten Lebak ditumbuhi berbagai macam vegetasi tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Selain banyak tumbuh rumput lapang juga terdapat lahan

perkebunan yang luas di Kabupaten Lebak. Lahan perkebunan ini merupakan potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Lebak karena dapat dimanfaatkan menjadi lahan penggembalaan dan hasil ikutan perkebunan terutama kelapa sawit dapat dijadikan pakan ternak. Lahan areal perkebunan di Kabupaten Lebak memiliki luas 71.000,27 Ha (Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, 2020).

Selain itu panen padi sawah di Kabupaten Lebak pada tahun 2020 seluas 103.549 Ha dan panen padi huma seluas 13.981 Ha. Sedangkan panen jagung luasnya yaitu 5.994 Ha serta panen kedelai luasnya sebesar 8 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021). Lahan sawah yang luas dapat menghasilkan dedak padi dan jerami padi yang melimpah. Dedak padi dan Jerami dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Begitu juga dengan jagung dan kedelai dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi yang sangat besar dalam mendukung pengembangan budidaya peternakan di Kabupaten Lebak, baik budidaya ternak oleh masyarakat maupun budidaya ternak yang dilakukan oleh perusahaan peternakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Potensi Penerimaan Daerah Sub Sektor Peternakan dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah Kabupaten Lebak
2. Masih rendahnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak.
3. Belum ada dasar hukum yang mengatur tentang tarif retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak
4. Belum pernah dilakukan kajian mengenai potensi PAD yang bersumber dari sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana kondisi pembangunan daerah Kabupaten Lebak ? dan Bagaimana retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang : Kondisi pembangunan daerah Kabupaten Lebak dan Retribusi yang bersumber dari sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Dengan mengetahui potensi penerimaan daerah sub sektor peternakan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan terhadap pengambil kebijakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A